

MEMBINGKAI PRAKTIK POLITIK DAN IDENTITAS DALAM MEDIA SIBER INDONESIA

FRAMING POLITICAL PRACTICES AND IDENTITY IN INDONESIA CYBERMEDIA

Siti Sarohmawati¹, Abdul Firman Ashaf²

ABSTRAK

Sebuah penelitian untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, mengenai sikap media terhadap isu politik dan agama Islam. Lebih khusus studi analisis *framing* terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengemuka ke publik pada bulan Oktober 2016. Dimana fokus penelitian ditujukan kepada dua media yakni *Republika.co.id* dan *Metrotvnews.com*. Bersumber kepada kedua media, ditemukan sebanyak 1.119 artikel berita kasus dugaan penistaan agama pada *Republika.co.id*. sedangkan pada *Metrotvnews.com* ditemukan sebanyak 628 artikel berita. Merujuk kepada teori Agenda Setting terkhusus agenda media, kedua media terlihat turut mengagendakan kasus dugaan tersebut. Melalui sampel artikel berita sebanyak 20 artikel dari masing – masing kedua media, kemudian dianalisis menggunakan 4 tahap analisis *framing* Robert N. Entman. Empat tahap tersebut yakni *define problems, causal interpretation, moral evaluation, serta treatment recommendation*. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan sikap yang tercermin melalui teks berita. *Republika.co.id* mengidentifikasi masalah ini pada etalase hukum, kemudian pada *Metrotvnews.com* masalah dinilai berada pada ranah politik.

Kata Kunci : Analisis *Framing*, Ahok & Al Maidah ayat 51, Agenda Setting, Sikap Media

ABSTRACT

It is a research to get description by using qualitative approach, concerning media attitude towards political issues and Islamic religions. More specifically the study of framing analysis related cases of alleged blasphemy by Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) who surfaced to the public in October 2016. Whereas the focus of research is addressed to two media, named Republika.co.id and Metrotvnews.com. Sourced to both media, found as many as 1199 articles news cases alleged defamation of religion on Republika.co.id. While on Metrotvnews.com found as many as 628 news articles. Referring to the Agenda Setting theory, especially the media agenda, the two media appear to contribute to the alleged case. Through a sample of news articles as many as 20 articles from each of the two media, then analyzed using 4 stages of framing analysis Robert N. Entman. The four stages are define problems, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. It was found that there are differences in attitude reflected through the news text. Republika.co.id identifies this problem in a legal view, and then on Metrotvnews.com the problem is considered to be in the political domain

Keywords: *Framing Analysis, Ahok & Al Maidahverse 51, Agenda Setting, Media Attitude*

¹Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

²Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

PENDAHULUAN

Pada bulan Oktober 2016 lalu, pemberitaan mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemuka ke publik berbarengan dengan kondisi menjelang Pilkada DKI Jakarta 2016. Berawal dari unggahan video oleh Buni Yani tanggal 6 Oktober 2016 pada sosial media *facebook*. Video yang diunggah tersebut berisi kegiatan Ahok saat kunjungan di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya Ahok mengucapkan kalimat “*dibohongi pakai surat Al –Maidah 51 macem – macem itu*”. Video yang diunggah oleh Buni Yani berasal dari video unggahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dengan durasi yang lebih pendek dari durasi video aslinya. Durasi video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta 01.48.32 (satu jam, empat puluh delapan menit, tiga puluh dua detik). Durasi video yang diunggah oleh Buni Yani lebih pendek yakni 00.30 (tiga puluh detik).

Video tersebut menjadi viral di dunia maya, seperti berita yang ditulis oleh tim redaksi *Republika.co.id* dengan judul “Video Ahok : *Anda dibohongi Alquran Surah Al – Maidah 51 Viral di Medsos*” (*Republika.co.id*, 6 oktober 2016). Berita tersebut memaparkan informasi mengenai video Ahok yang banyak diperbincangkan baik melalui *facebook* maupun *twitter*. Peristiwa tersebut menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 87,21 % dari total populasi nasional 252,7 Juta masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Ketika seorang tokoh masyarakat atau pejabat pemerintahan diberitakan melakukan penistaan agama, maka akan menimbulkan konflik atau rasa kecewa di masyarakat. Hal ini pun dibenarkan oleh hasil penelitian yang mengangkat tema “isu sara dalam pilkada DKI Jakarta 2012” Sagita (2016). Dari penelitian tersebut, memberi penjelasan bahwa pemberitaan yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) akan menjadi konflik di masyarakat Indonesia.

Pelaporan dan kecaman mengenai pernyataan Ahok terus berdatangan dari berbagai pihak. Kemudian berita terus bergulir dengan menyoroti hal yang berbeda – beda. Mulai dari pemberitaan klarifikasi bahwa Ahok tidak berniat menghina Al –Qur’an, kontroversi terkait durasi video dan transkrip yang dibuat oleh Buni Yani saat mengunggah video, serta petisi gugatan Ahok. Berlanjut pada tuntutan massa yang

ditujukan kepada penegak hukum untuk memproses kasus Ahok yang terjadi hingga empat tahap. Dimulai dari demo 28 Oktober 2016 serentak diberbagai daerah seperti Sumatera Utara, Bogor, Tasikmalaya, hingga Lampung. Kemudian disusul oleh Aksi 4 November 2016 (aksi 411), Aksi 2 Desember 2016 (aksi 212), hingga Aksi 4 Desember 2016 (aksi 412). Pemberitaan berlanjut hingga penetapan Ahok sebagai tersangka, putusan Polri untuk melakukan gelar perkara terbuka, hingga kontroversi hubungan kasus dugaan ini dengan Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum.

Jika diamati melalui kacamata Ilmu Komunikasi, fenomena sosial ini berada pada ruang lingkup teori Agenda setting dengan lebih khusus kepada agenda media. Agenda setting menekankan bahwa apa yang menjadi agenda media akan menjadi agenda juga di masyarakat. Melalui fenomena ini, berlaku sebaliknya bahwa topik yang diperbincangkan oleh masyarakat menjadi agenda bagi media. Hingga pada akhirnya pengembangan topik oleh sejumlah media menjadi agenda perbincangan oleh masyarakat. Berawal dari video unggahan Buni Yani yang pada akhirnya diperbincangkan oleh masyarakat, kemudian lembaga Pers sebagai badan yang berfungsi menginformasikan, mendidik, dan menghibur (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) turut memberitakan peristiwa tersebut. Media Konvensional maupun *online* turut memberitakan perkembangan kasus ini. Namun, media *online* atau lebih khusus sejumlah jurnalisme *online* saat ini memiliki tempat penting di masyarakat.

Sejumlah riset telah menggambarkan keaktifan masyarakat Indonesia dalam mengakses berita *online*. Data pengunjung media *online* yang dirilis oleh Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, sebanyak 132,7 juta orang mengakses internet dari total populasi 256,2 juta jumlah penduduk Indonesia. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 127,9 juta penduduk Indonesia menggunakan internet untuk akses berita *online*. Media *online* yang turut memberitakan kasus Ahok dan Q.S Al Muidah 51 dua diantaranya *Republika.co.id* dan *Metrotvnews.com*. *Republika.co.id* dengan *tagline* jendela umat memberi perhatian cukup besar terhadap peristiwa dengan kategori islami. Konten informasi keislaman pada *Republika.co.id* ialah 80% serta informasi umum 20% (*company profile Republika online*). Kemudian *Metrotvnews.com* yang merupakan penampakan anak media dari Metro Tv dibawah naungan Media Group dengan CEO Surya Paloh seorang politisi Partai Nasdem. Partai Nasdem ini dalam PILKADA DKI Jakarta, tercatat sebagai partai pendukung Ahok dalam pencalonan

Gubernur DKI periode mendatang Tahun 2017 – 2021 (kpu.jakarta.go.id diakses 13 Desember 2016, Pukul 14.00 WIB).

Menarik untuk meneliti sikap kedua media tersebut yang tercermin pada teks berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Sebab, latar belakang media juga kerap kali terkamufase dalam sebuah ideologi media yang mempengaruhi isi pemberitaan. Sedikitnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi isi berita dikemukakan oleh Reese dan Shoemaker (1996: 222) yakni, ideologi media dan ekstramedia. Melalui Analisis *Framing* model Robert N. Entman yang meletakkan dasar – dasar analisis *framing* peneliti tertarik untuk melihat isu mana yang diberi penekanan oleh kedua media. Bahwa setiap media membentuk atau memberi penekanan terhadap isu tertentu sehingga isu tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan isu lainnya (Eriyanto, 2002 : 11). *Framing* model Robert N. Entman melalui empat perangkat yakni *define problems, causal interpretation, moral evaluation* serta *treatment recommendation*. Melalui empat perangkat tersebut yang digunakan untuk analisis teks berita mengenai Ahok dan Q.S Al – Maidah 51 didapatkan perbedaan sikap kedua media pada level teks berita.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana sikap media melalui *framing* Robert N. Entman yang dilakukan oleh media *online* Republika.co.id dan Metrotvnews.com terhadap pemberitaan isu politik dan agama Islam.”

TUJUAN

Secara deskriptif mendapatkan penjelasan mengenai sikap media melalui *framing* berita pada isu politik dan agama Islam yang tercermin dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, dilihat dari (1) identifikasi masalah, (2) interpretasi penyebab masalah, (3) evaluasi moral dan (4) rekomendasi penyelesaian masalah.

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari dokumentasi teks berita Republika.co.id dan Metrotvnews.com Periode 7 Oktober – 4 Desember 2016, serta penelusuran kepustakaan. Pengolahan data melalui tiga tahap yakni tahap penyeleksian, tahap analisa data serta tahap interpretasi. Pada tahap penyeleksian, data

diseleksi sesuai periode yang telah ditentukan. Kemudian dipilih sebanyak 20 berita dari masing - masing media dengan kategori tema bahasan serta waktu terbit yang relatif sama dan berdekatan. Tahap analisa data yakni pemberitaan dari kedua media dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman melalui 4 perangkat. Empat perangkat analisis yang dimaksud yakni, *define problems* (mengidentifikasi masalah), *causal interpretation* (interpretasi penyebab masalah), *moral evaluation* (evaluasi moral), serta *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian). Tahap terakhir yakni interpretasi, berita yang sudah dianalisis diberi kesimpulan berupa konteks atau *framing* dari kedua media. Pembahasan mengenai konteks merupakan hasil dari interpretasi antara temuan penelitian dengan literatur pendukung yang digunakan. Kesemuanya digunakan untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif sikap media terhadap isu politik dan agama Islam yang tercermin dalam kasus dugaan penistaan Agama oleh Ahok. Adapun sampel berita yang dianalisis sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi berita *Republika.co.id*

No	Tanggal/Waktu Terbit	Judul Berita
1.	Jumat, 07 Oktober 2016, Pukul. 15:56 WIB	'Video Ahok Diputar Berulang Kali Tetap Ada Unsur Penodaan Agama'
2.	Jumat, 07 Oktober 2016, Pukul. 10:37 WIB	Ahok Diduga Lecehkan Agama, Pengamat: Seperti Maling Teriak Maling
3.	Sabtu, 08 Oktober 2016, Pukul. 10:53 WIB	HTI: Ucapan Ahok Menghina Keagungan dan Kesucian Alquran
4.	Rabu , 02 November 2016, Pukul. 07:42 WIB	Eks Menkopolkam: Jokowi Tersandera dan Dilema dalam Kasus Ahok
5.	Rabu , 02 November 2016, Pukul. 12:30 WIB	SBY: Sampai Lebaran Kuda Demo Ahok Terus Ada
6.	Kamis,03 November 2016, Pukul. 11:53 WIB	'Ahok Harus Segera Diadili'
7.	Kamis,03 November 2016, Pukul. 14:12 WIB	Jadi Saksi Ahli, Habib Rizieq Harap Malam Ini Ahok Tersangka
8.	Senin ,07 November 2016, Pukul. 10:32 WIB	Ini Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata Saat Demo 4 November
9.	Selasa,08 November 2016, Pukul. 00:20 WIB	Kasus Ahok Jadi Bola Panas yang akan Segera Dilepaskan Polri
10.	Jumat, 11 November 2016, Pukul. 00:18 WIB	Buni Yani: Saya tidak Pernah Mengedit Video Ahok
11.	Senin, 14 November 2016, Pukul. 10:57 WIB	Ahok: Saya Yakin tidak Salah dan tidak Lakukan Penistaan Agama
12.	Selasa,15 November 2016, Pukul. 17:28 WIB	Zulkifli: Jangan karena Ahok Berulah, Presiden Kena Getah
13.	Rabu, 16 November 2016, Pukul. 11:11 WIB	Ini Alasan Kapolri tak Lakukan Penahanan Terhadap Ahok
14.	Rabu, 16 November 2016, Pukul. 10:09 WIB	Kabareskrim: Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama
15.	Senin, 21 November 2016,	Ahok: Saya Memang Harus Perbaiki Sikap

	Pukul. 10:52 WIB	
16.	Jumat, 25 November 2016, Pukul. 07:19 WIB	HNW: Jika Kasus Ahok tak Terkesan Tebang Pilih, tak Ada Aksi 212
17.	Sabtu, 26 November 2016, Pukul. 19:18 WIB	Polisi Dituding Istimewakan Ahok
18.	Selasa, 29 November 2016, Pukul. 20:10 WIB	PKB Kawal Kasus Ahok Agar tak 'Masuk Angin'
19.	Kamis, 01 Desember 2016, Pukul. 15:20 WIB	Bareskrim: Ada 51 Alat Bukti Kasus Penistaan Agama oleh Ahok
20.	Kamis, 01 Desember 2016, Pukul. 18:21 WIB	Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai

Sumber : <http://www.republika.co.id/indeks> Periode Oktober - Desember 2016

Tabel 2. Rekapitulasi berita *Metrotvnews.com*

No	Tanggal/Waktu terbit	Judul Berita
1.	Jumat, 07 Oktober 2016/ Pukul. 03:11 WIB	Ahok: Saya Tidak Berniat Melecehkan Ayat Al-Quran
2.	Jumat, 07 Oktober 2016/ Pukul. 15:41 WIB	Nusron: Ahok Mengedukasi Warga, Bukan Menistakan Agama
3.	Selasa, 01 November 2016/ Pukul. 21:29 WIB	Gerakan 4 November tak murni kasus hukum.
4.	Jumat, 04 November 2016/ Pukul. 22:49 WIB	Tak Kondusif, Polisi tak Henti Menembakkan Gas Air Mata
5.	Sabtu, 05 November 2016/ Pukul. 00:49 WIB	Jokowi sebut demonstrasi ditunggangi aktor politik.
6.	Minggu, 06 November 2016/ Pukul. 00:52 WIB	Ketika Ahok Kenang Sang Ibu Angkat yang Seorang Muslim
7.	Minggu, 06 November 2016/ Pukul. 15:53 WIB	Soal Ahok, Surya Paloh: Kita Ikuti Proses Hukum
8.	Senin, 07 November 2016/ Pukul. 17:35 WIB	Bareskrim Cengar Ahok 40 Pertanyaan
9.	Rabu, 09 November 2016/ Pukul. 07:45 WIB	Ahok: Transkrip Buni Yani Berbahaya
10.	Sabtu, 12 November 2016/ Pukul. 19:31 WIB	Kasus Penistaan Agama Jangan Jadi `Bola Panas`
11.	Rabu, 16 November 2016/ Pukul. 00:03 WIB	Tersandung Kasus Penistaan Agama, Warga Tetap Pilih Ahok
12.	Rabu, 16 November 2016/ Pukul. 08:42 WIB	Ahok Dinilai Korban Politik Identitas
13.	Rabu, 16 November 2016/ Pukul. 10:12 WIB	Ahok Jadi Tersangka
14.	Kamis, 17 November 2016/ Pukul. 02:28 WIB	Nasdem Tetap Dukung Ahok
15.	Sabtu, 19 November 2016/ Pukul. 01:09 WIB	Disebut Tuduh Pedemo 4 November Bayaran, Ahok: Saya <i>Ngomong</i> Apa Saja Dipelintir
16.	Rabu, 23 November 2016/ Pukul 07:05 WIB	Kalau Ahok Bersalah Katakan Bersalah, Tapi Jangan Dia Dikorbankan
17.	Senin, 28 November 2016/ Pukul. 02:12 WIB	Jaga Tutur Kata, Ahok Diminta Pakai Selotip Ajaib
18.	Kamis, 01 Desember 2016/ Pukul. 11:55 WIB	Ahok tak Ditahan karena Sudah Dicekal
19.	Kamis, 01 Desember 2016/ Pukul. 12:14 WIB	Ahok Minta Doa
20.	Kamis, 01 Desember 2016/ Pukul 15:08 WIB	Kuasa Hukum Ahok Minta Semua Pihak Hormati Azas Praduga tak Bersalah

HASIL PENELITIAN

A. *Frame* *Republika.co.id* : Masalah Hukum

Republika.co.id menerbitkan secara *online* kasus dugaan penistaan agama dimulai dari tanggal 6 Oktober 2016. Ditemukan sebanyak 1.119 berita dengan tema kasus dugaan penistaan agama yang diterbitkan hingga 4 Desember 2016. Bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh *republika.co.id* dilihat melalui identifikasi masalah, interpretasi penyebab masalah, evaluasi moral serta rekomendasi penyelesaian sebagai berikut :

Tabel 3. *Frame*: Kasus Penistaan Agama oleh Ahok adalah masalah hukum

<i>Problem Identification</i>	Masalah Hukum
<i>Causal Interpretation</i>	Ahok sebagai aktor penyebab masalah karena ucapannya menyinggung perasaan umat muslim.
<i>Moral Evaluation</i>	Pemimpin seharusnya menghargai perbedaan dengan menjaga persatuan bangsa. Bukan malah menistakan agama.
<i>Treatment Recommendation</i>	Dibawa ke pengadilan serta menghimbau muslim untuk tidak memilih penista agama pada Pilkada DKI 2017.

Identifikasi Masalah: *republika.co.id* mengidentifikasi kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan kasus ini disoroti lebih banyak dari aspek hukum. Terdapat beberapa alasan, mengapa kasus ini lebih dominan dibingkai sebagai masalah hukum oleh *republika.co.id*. Pertama, alokasi lebih besar pada berita terkait pendapat narasumber yang dihadirkan menuntut adanya jalur hukum untuk kasus ini. Hal tersebut didukung adanya pemberitaan melalui pendapat narasumber yang sepakat bahwa Ahok bersalah. Narasumber yang dipilih oleh *republika.co.id* lebih banyak berlatar belakang ormas Islam dan tokoh agama yakni HTI, HMI, GNPF, FPI, MUI, Hidayat Nur Wahid, Habib Rizieq, AA Gym, serta Ustadz Arifin Ilham. Sepakat dengan Darwis (dalam prosiding, 2016: 164), bahwa *republika.co.id* yang paling banyak menjadi narasumber adalah dari kalangan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam sebanyak 40%.

Kedua, berita yang ditampilkan menjelaskan secara hukum syar'i melalui fatwa ulama, dan penjabaran pasal yang menjerat Ahok yakni pasal 156a tentang penodaan agama. Ketiga, pemberitaan terkait kasus ini dianggap sebagai bola panas untuk Polri, Kejaksaan Agung dan Jokowi. Segala hal yang berkenaan dengan kasus ini dibahas sebagai masalah yang menyangkut masyarakat luas sehingga harus diselesaikan melalui hukum yang adil.

Interpretasi Penyebab Masalah: berita *republika.co.id* didominasi bahwa Basuki Tjahaja Purnama diposisikan sebagai pelaku (aktor) menjadi penyebab masalah. Ahok ditempatkan sebagai sebab yang mengakibatkan berbagai masalah tersebut. Hal ini disebabkan pada teks berita penilaian hukum lebih banyak dialokasikan kepada Ahok, bahwa Ahok bersalah dan menyebabkan umat islam tersinggung, sehingga perlu diproses secara hukum. Ahok dilaporkan atas dasar "KUHP pasal 165 dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Seperti ungkapan juru bicara HTI bahwa ucapan Ahok menghina keagungan dan kesucian Al-Qur'an pada berita.³ Ditegaskan kembali melalui pernyataan SBY pada judul berita "SBY: Sampai Lebaran Kuda Demo Ahok Terus Ada", bahwa hukum harus berjalan sesuai KUHP.

Pemilihan narasumber yang menyatakan pendapat dengan dasar hukum, semakin menyoroti bahwa Ahok sebagai penyebab masalah. Bahkan bukan masyarakat yang dijadikan sebab atau pengunggah video. Justru di dalam berita dengan judul "Buni Yani: Saya tidak Pernah Mengedit Video Ahok" memberi penekanan bahwa Buni tidak mengedit hanya sekedar mengupload sehingga Buni bukanlah penyebab masalah ini. Bahkan di dalam berita juga dimasukkan pendapat Neta sebagai salah satu narasumber pada judul berita "Polisi Dituding Istimewakan Ahok" bahwa "*Polri harusnya berterima kasih pada Buni Yani yang sudah membuka kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, sehingga publik mengetahuinya secara luas,*" kata Neta.

Evaluasi Moral: penilaian atas Ahok sebagai penyebab masalah ini dilegitimasi melalui alasan yang sama – sama sepakat bahwa Ahok bersalah. Penilaian moral yang ditekankan dalam berita yakni sebagai pemimpin harus bisa menjaga dan mengawal kebhinekaan. Seperti ditampilkan dalam berita dengan judul "Zulkifli: Jangan karena

³<http://republika.co.id/indeks/news/ucapan-ahok-menghina-keagungan-kesucian-Alquran>, diakses pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 11.00 WIB.

Ahok Berulah, Presiden Kena Getah”. Dalam berita tersebut menekankan penilaian moral bahwa pemimpin dengan keyakinan berbeda dapat tetap menjaga perbedaan dan mempersatukan rakyat. Selain itu, penilaian moral juga diberikan kepada aparat penegak hukum untuk berlaku adil menuntaskan permasalahan tersebut. Secara tersirat juga memberikan penilaian moral terhadap pihak – pihak yang berjuang menegakkan keadilan melalui aksi massa.

Treatment Recommendation: banyaknya berita yang disajikan oleh *republika.co.id* menekankan penyelesaian agar kasus ini dituntaskan melalui jalur hukum yang adil dan terbuka. Setidaknya dari 20 berita yang dianalisis terdapat 12 berita dengan narasumber yang sepakat membawa kasus ini ke jalur hukum. Selain itu, secara tersirat berita yang ditampilkan menekankan penyelesaian berupa himbuan bagi muslim untuk tidak memilih penista agama pada Pilkada DKI 2017 tersebut.

B.Frame Metrotvnews.com : Masalah Politik

Tabel 4. Frame: Kasus Penistaan Agama oleh Ahok adalah masalah politik

<i>Problem Identification</i>	Masalah Politik
<i>Causal Interpretation</i>	Pihak – Pihak yang melaporkan Ahok serta Aktor Politik yang memanfaatkan kasus Ahok.
<i>Moral Evaluation</i>	Ahok adalah korban politik identitas. Pemerintah dinilai telah mendengarkan aspirasi massa penuntut kasus dugaan penistaan agama dengan secara tegas berjanji memproses kasus Ahok.
<i>Treatment Recommendation</i>	Hentikan Politik Mobilisasi Massa dengan mengikuti proses hukum yang berjalan,

Identifikasi Masalah: kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibingkai oleh *metrotvnews.com* sebagai masalah politik. Penilaian ini didasarkan oleh banyaknya pemberitaan yang menghadirkan narasumber dari politikus, pengamat politik, hingga pemegang kekuasaan negara. Narasumber yang dipilih membahas secara politik kasus yang menjerat Ahok. Bahwa kasus Ahok bukan sekedar perkara hukum melainkan adanya tujuan politik untuk menggulingkan pihak tertentu (pemerintah Jokowi), atau sekedar menurunkan elektabilitas Ahok saat Pilkada DKI Jakarta. Berita yang mengalokasikan permasalahan tersebut dengan judul “Gerakan 4 November tak murni kasus hukum”, “Jokowi sebut demonstrasi ditunggangi aktor politik”, “kasus penistaan agama jangan jadi bola panas”, serta judul “Ahok korban

politik identitas". Permasalahan kasus ini dialokasikan lebih besar ke ranah politik dengan mengkaitkan momentum Pilkada. Seperti isi berita dengan judul "Nasdem tetap dukung Ahok", serta "tersandung kasus dugaan penistaan agama, warga tetap pilih Ahok". Di dalam berita juga menginformasikan terkait proses hukum, namun lebih dominan kepada ranah politik.

Interpretasi Penyebab Masalah: pihak – pihak yang melaporkan Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama serta aktor politik yang secara tersirat dinilai sebagai penyebab masalah. Dalam berita penyebab masalah digambarkan sebagai kompetitor yang mencoba menurunkan elektabilitas Ahok, atau lebih jauh sebagai pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi karena tidak dapat menegakkan hukum keadilan dengan membela Ahok. Seperti dilansir dalam berita "kalau Ahok bersalah, katakan bersalah, tapi jangan dia dikorbankan" dengan narasumber Ikrar Nusa Bakti seorang pengamat politik. Sedangkan pemerintah khususnya Jokowi dinilai telah bertanggungjawab dengan mendengarkan aspirasi rakyat, Polri sebagai pihak yang membantu menangani kasus ini tidak dinilai sebagai penyebab, sebab muatan politik menjadi isu utama dalam berita.

Evaluasi Moral: pemerintah dinilai telah mendengarkan aspirasi massa penuntut kasus dugaan penistaan agama dengan secara tegas berjanji memproses kasus Ahok. Aparat penegak hukum berlaku adil dengan bekerja secara profesional dan sesuai porsinya. Bahkan melalui hal kecil bahwa Brimob, TNI dan pihak keamanan yang menjaga aksi dinilai telah bekerja membantu jalannya kasus ini. Hal tersebut seperti dalam berita "tak kondusif, polisi tak henti menembakkan gas air mata".

Namun pihak pelapor dinilai seolah tidak mempercayai keputusan pemerintah sehingga aksi terus berlangsung. Selain itu aktor politik tertentu dinilai tidak *fair* & beradab karena memanfaatkan kasus Ahok sebagai strategi menurunkan elektabilitas dan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Seperti isu yang diangkat dalam berita "Ahok dinilai korban politik identitas" serta "Ahok tidak bersalah, hanyalah korban dari para kompetitor yang berupaya menurunkan elektabilitas Ahok".

Rekomendasi Penyelesaian: penyelesaian yang ditekankan melalui teks berita terkait kasus Ahok lebih kepada pengungkapan pihak – pihak yang memiliki tujuan politik dengan menghentikan politik mobilisasi massa, selain itu bekerjasama untuk menegakkan hukum.

PEMBAHASAN

Sikap Media online *Republika.co.id* dan *Metrotvnews.com*

Media telah sejak dahulu berperan dalam menyajikan konteks politik dan agama. Media hadir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah politik dan agama Islam khususnya. Bermula dari adanya sebutan kaum skripturalis dan substansialis media berperan penting (Liddle, 1997: 105). Kaum skripturalis dianggap sebagai kaum yang memiliki intelektual tinggi dalam menorehkan gagasan mengenai Islam melalui media massa. Sedangkan kaum substansialis dipandang sebagai kaum Islam modernis di Indonesia yang dimotori oleh kalangan non skripturalis. Pertentangan antara kedua kaum ini banyak dilansir dalam halaman – halaman *Media Dakwah*. Jika sejarah berkata demikian, maka saat ini melalui kasus dugaan penistaan agama kita kembali melihat perwajahan sinergi antara media, politik dan agama islam. Melalui sikap–sikap media yang ditunjukkan dari teks berita, dengan kacamata *framing* model Robert N.Entman.

Kasus dugaan penistaan agama yang dilimpahkan kepada Ahok, direspon oleh kedua media dengan sangat variatif. Dinamika Ahok bersalah sehingga harus diproses secara hukum menjadi respon aktif oleh *republika.co.id*. Melalui narasumber yang pro jikalau Ahok bersalah, *republika.co.id* membingkai bahwa kasus dugaan ini layak diproses tuntas melalui jalur hukum. Narasumber yang dihadirkan oleh media ini didominasi oleh organisasi masyarakat (ormas) islam seperti HTI, FPI, PP Muhammadiyah, NU, GNPF, Gerakan Pemuda Anshor serta beberapa ulama, *kyai*, dan ustad seperti Aa Gym, Arifin Ilham dan Rizieq Shihab. Selain itu, dari jajaran tokoh terkemuka seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Eks Menkopolkum dan pengamat hukum.

Respon yang menarik juga ditunjukkan oleh *metrotvnews.com* mengenai peristiwa dugaan ini bahwa Ahok dinilai tidak bersalah, justru mengedukasi warga melalui pidatonya. Selain itu, *metrotvnews.com* cenderung membingkai peristiwa ini bahwa Ahok sebagai korban politik identitas, didasari oleh argumen bahwa peristiwa ini menjadi bola panas ketika Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Berita yang diposting mengarah kepada politik. Melalui pemilihan narasumber yang ditampilkan, seperti Nusron, Surya Paloh, Pengamat Politik, Pihak partai Nasdem, warga Jakarta pendukung

Ahok, Bawaslu DKI, Ahok-Djarot, Fadli Zon, Plt Gubernur DKI, klaim pendapat bahwa Ahok sebagai korban politik.

Republika.co.id dengan judul berita *video Ahok diputar berulang kali tetap ada penistaan agama* (07 Oktober 2016), dan judul berita pada *metrotvnews.com* *Ahok: Saya tidak berniat melecehkan Al-Quran* (07 Oktober 2016). Melalui elemen pendefinisian masalah didapatkan bahwa *republika.co.id* memilih penekanan isu bahwa Ahok bersalah. Kemudian *metrotvnews.com* memilih penekanan isu bahwa Ahok tidak berniat menistakan agama apapun. Perbedaan sikap lainnya dituangkan dalam tabel perbedaan *frame* antara *republika.co.id* dan *metrotvnews.com* berikut ini :

Tabel 5. Perbedaan *frame* *Republika.co.id* dan *Metrotvnews.com*

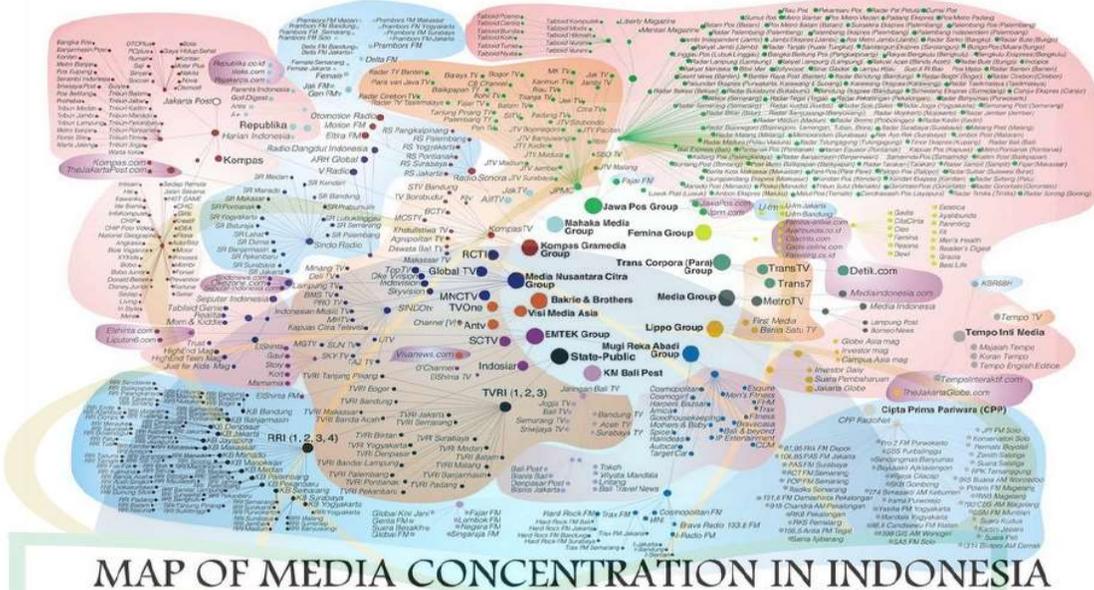
Elemen Framing Robert N.Entman	<i>Republika.co.id</i>	<i>Metrotvnews.com</i>
<i>Problem Identification</i> (Identifikasi Masalah)	Masalah Hukum	Masalah Politik
<i>Causal Interpretation</i> (Interpretasi penyebab masalah)	Ahok sebagai aktor penyebab masalah karena ucapannya menyinggung perasaan umat muslim.	Pihak – Pihak yang melaporkan Ahok serta Aktor Politik yang memanfaatkan kasus Ahok.
<i>Moral Evaluation</i> (Evaluasi Moral)	Pemimpin seharusnya menghargai perbedaan dengan menjaga persatuan bangsa. Bukan malah menistakan agama.	Ahok adalah korban politik identitas. Pemerintah dinilai telah mendengarkan aspirasi massa penuntut kasus dugaan penistaan agama dengan secara tegas berjanji memproses kasus Ahok.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi Penyelesaian)	Dibawa ke pengadilan serta menghimbau muslim untuk tidak memilih penista agama pada Pilkada DKI 2017.	Hentikan Politik Mobilisasi massa untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

Sumber : Hasil Penelitian Bulan Desember 2016

Adanya perbedaan *framing* dikatakan sebagai hal yang cukup wajar. Sebab setiap media memiliki cara pandang tertentu terhadap sebuah peristiwa. Seperti ulasan pada tinjauan pustaka, bahwa dalam memproduksi sebuah berita terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sajian berita diantaranya ideologi media dan ekstramedia. Reese dan Shoemaker (1996: 222), dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, menegaskan bahwa ideologi merupakan hal yang dipandang sebagai ide atau gagasan pemilik media yang berkenaan dengan rutinitas dan organisasi

media itu bekerja. Dalam arti lain, ideologi diartikan sebagai kerangka pikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk dapat melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Ideologi media sangat berkenaan dengan visi misi dari kedua media. berbicara ideologi *metrotvnews.com* sama halnya dengan ideologi Metro TV. Keduanya merupakan anak perusahaan dari Media Group dengan CEO Surya Paloh. Peta kepemilikan media tergambar jelas dalam gambar berikut :



Gambar 1. Peta Media Concentration

Sumber : Merlyna Lim (<http://merlyna.org/2012/02/21/league-of-13-media-concentration-in-indonesia>, Diakses 18 April 2017, Pukul 10.36 WIB.

Metro TV melakukan redefenisi ulang tentang visi dan misi serta tujuan didirikannya pada tahun 2010 dengan melibatkan konsultan. Perlu waktu selama 2 tahun untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa Metro TV akan maju jika memiliki orientasi dan ideologi yang jelas. Pada akhirnya Metro TV memiliki ideologi sesuai dengan visi yang dimilikinya yaitu, “untuk menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan

menjadi nomor satu dalam program berita”. Tekad tersebut membuahkan hasil dengan menjadikan Metro TV *top of mind* sumber informasi pencarian berita.⁴

Selain itu penayangan aktivitas politik dari pemiliknya (Nasional Demokrat), seolah olah Metro TV merupakan *official* TV Nasdem. Disebutkan oleh Idi Subandy dalam Oji Kurniadi (2013: 3), “Metro TV juga membawa beban sebagai media pengusaha atau politisi tertentu yang membawa bias kepentingan bisnis dan politik”. Konteks historis memberi pandangan bahwa sejarah telah menceritakan demikian terkait ideologi Metro TV. Melalui hasil temuan penelitian ini, isu politik dan Agama Islam dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dialokasikan oleh *metrotvnews.com* sebagai masalah politik. Metro Tv membawa beban sebagai media pengusaha atau politik. Tentu pengetahuan berbau politis kental bersinggungan. Namun, *metrotvnews.com* memberi penekanan masalah yang menarik mencakup aspek politik dan ketaatan hukum. Penyelesaian tersebut dengan hentikan politik mobilisasi massa dengan mengikuti hukum yang berjalan.

Selaras dengan literatur yang ditulis oleh Jurnalis Media Indonesia dengan judul “setelah Ahok tersangka” (17 November 2016), “memulihkan ketenangan rakyat” serta “wibawa negara pada kasus Ahok” (09 November 2016).⁵ Dikatakan dalam literatur tersebut “*kita berharap tidak ada lagi kelompok atau individu yang merecoki hukum dan demokrasi dalam perkara Ahok untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok. Bila, setelah Ahok dijadikan tersangka, masih ada kelompok yang mencoba merecoki dan membajak hukum serta demokrasi demi kepentingan politik. Kita harus katakan mereka memang mencari makan dari kebisingan politik yang sengaja mereka ciptakan sendiri*”.

Konteks historis juga mencoba menceritakan kembali konteks ideologi media Republika yang kemudian menjadi benang merah pembahasan ideologi media *republika.co.id*. Presiden Soeharto membeli saham Republika, selanjutnya harian Republika dipimpin oleh Parni Hadi seorang wartawan senior yang pernah bekerja di kantor berita Antara. Sejarah ini mempererat kerjasama dengan kantor berita Antara, sehingga tidak heran apabila beberapa berita terbitan *republika.co.id* bersumber dari Antara. Selain itu,

⁴Oji Kurniadi, 2013. “Budaya Jurnalistik Metro TV”, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember) via <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/download/6038/314918> diakses 18 April 2017 Pukul 10.33 WIB.

⁵<http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

sumbangsih intelektual muslim pada Republika juga terletak pada tingkat Dewan Penasehat. Seperti Dr. M. Amien Rais, pada pembahasan kasus dugaan penistaan agama turut menyumbangkan pemikiran yang juga diterbitkan oleh *republika.co.id*. Seperti judul berita “Amien Rais : Bung Jokowi selesaikan skandal Ahok”. (*republika.co.id* edisi 28 Oktober 2016, Pukul. 06.18 WIB). Serta “Amien Rais : Bung Jokowi jangan terlambat” (*republika.co.id* edisi 8 November 2016, Pukul. 10.00 WIB). Dewan penasehat lain, seperti Dr. Nurcholis Madjid (cendekiawan muslim, pendiri Yayasan Wakaf Paramadina).

Kemudian David Hill dalam Ashaf (2006: 6) mengemukakan sekalipun *Republika* terkesan membawa aspirasi mayoritas jurnalis serta intelektual Islam yang liberal dan sekuler dalam mengangkat isu maupun peristiwa. Akan tetapi secara ideologi ia menginformasikan nilai – nilai Islam sebagaimana *Kompas* dan *Suara Pembaruan* yang Kristen. Dengan demikian *Republika* dikenali sebagai pers Islam. Pandangan tersebut tentu membawa keraguan pada objektivitas pemberitaan. Kala itu, Parni Hadi mengatakan “kami akan bersifat profesional sebagaimana halnya koran – koran lain.” Nafas islam dalam *Republika* adalah *Sublim* dan *Subtil*.

Benang merah yang dapat diambil untuk menggambarkan ideologi media *Republika online* yang merupakan perpanjangan tangan harian umum *Republika* adalah pers Islam. Sehingga melalui *tagline* jendela umat, berupaya menyajikan konten Islam untuk masyarakat. Dengan demikian melalui kasus dugaan penistaan agama, *republika.co.id* mengidentifikasi masalah ini ke ranah hukum. Jelas terlihat apabila dikaitkan antara konteks historis dengan konteks temuan penelitian ini. Sebab, menjadi pers Islam tentu memiliki pandangan demikian terhadap kasus ini. Adanya penodaan agama terutama pada Agama Islam, tentu dipandang menjadi sebuah pelanggaran.

Didukung oleh penelitian Sagita (2016: 155) melalui analisis isi dengan kategori topik berita, bahwa *republika.co.id* lebih banyak kepada seruan agar kepolisian memproses pelaporan masyarakat tentang penistaan agama oleh Ahok sebanyak 38% dan seruan penistaan agama sebanyak 18%. Serta literatur oleh Abdullah Sammy seorang Jurnalis Republika bertajuk editorial dengan judul “Membongkar Argumentasi Diboongi Pakai Surat Al Maidah (Bagian 2)” disebutkan pada paragraf terakhir artikel “*Makna dalam*

ucapan Ahok ini jelas bermuatan negatif. Sebab ini bukan sekedar menyangkut politik melainkan mencampuri urusan kepercayaan agama lain. Disisi lain, memakai Al-Qur'an dalam setiap bidang hidup, termasuk Al Maidah ayat 51 adalah kewajiban bagi setiap orang beragama muslim. Ahok yang notabene non muslim, mengartikan kewajiban orang muslim memakai Al Maidah 51 ini sebagai sebuah aksi berbohong dan tindakan pembodohan. Disinilah kunci utamanya.”⁶

Demikianlah teks berita dikotak – kotakan melalui kacamata ideologi. Disisi lain, teks berita dipengaruhi oleh ekstramedia khususnya pada sumber berita. Melalui pemilihan narasumber seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terlihat perbedaan *framing* terkait kasus dugaan penistaan agama. Pada akhirnya perbedaan – perbedaan tersebut menjadikan kita kaya akan pengetahuan, bagi yang memahaminya. Namun, tetap perlu filter yang baik untuk menghadapi terpaan berita.

PENUTUP

Dari hasil analisis *framing* berita media *republika.co.id* dan *metrotvnews.com* dengan tema kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Thajaja Purnama (Ahok), penulis menyimpulkan hal berikut :

1. Terdapat perbedaan sikap media *online republika.co.id* dan *metrotvnews.com* dalam menampilkan teks berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. *Republika.co.id* melihat kasus dugaan ini sebagai masalah hukum, sedangkan *metrotvnews.com* melihat sebagai masalah politik. *Republika.co.id* menilai Ahok sebagai penyebab masalah dari kasus dugaan ini, sedangkan *metrotvnews.com* menilai pihak pelapor dan aktor politik yang secara tersirat ingin menurunkan elektabilitas Ahok sebagai penyebab masalah.

Kemudian evaluasi moral yang digambarkan oleh *republika.co.id* melalui teks berita berupa Pemimpin seharusnya menghargai perbedaan dengan menjaga persatuan bangsa, bukan malah menistakan agama. Kemudian evaluasi moral oleh *metrotvnews.com* digambarkan bahwa Ahok adalah korban politik identitas dalam kasus dugaan ini, selain itu pemerintah dinilai telah adil dengan mendengarkan aspirasi rakyat penuntut kasus dugaan penistaan agama. Terakhir, penyelesaian

⁶<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/11/10/ogeohr385-membongkar-argumentasi-dibohongi-pakai-surat-al-maidah-bagian-2-part2/> diakses tanggal 14 Maret 2017, Pukul 10.30. WIB.

masalah yang ditekankan oleh *republika.co.id* bahwa kasus dugaan ini segera di proses secara hukum dengan tuntas. *Metrotvnews.com* merekomendasikan penyelesaian berupa hentikan politik mobilisasi massa serta mengikuti proses hukum yang berjalan.

2. Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi produksi berita media *online* diantaranya ideologi media dan ekstramedia. Baik *metrotvnews.com* maupun *republika.co.id* ideologi media mempengaruhi teks berita yang ditampilkan. *Republika.co.id* dengan *background* media *online* islam serta *metrotvnews.com* melalui ideologi pemilik media sekaligus pemilik partai pendukung calon gubernur petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua hal tersebut mempengaruhi tampilan teks berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Faktor ekstramedia yang mempengaruhi yakni respon aktif masyarakat terhadap kasus dugaan penistaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ashaf, Abdul Firman, “Perlawanan Pers Islam pada Masa OrdeBaru”, *MediaTor* Vol. 7, No. 1, Juni 2006

Eriyanto, 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS

Liddle, William R. 1997. *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sagita, Darwis, “Analisis Isi Berita Pernyataan Kontroversial Gubernur Basuki Tjahaya Purnama tentang Isi Penistaan Agama pada Media Online” dalam Hamad, Ibnu Dkk (Eds), 2016. *Prosiding Seminar Nasional: Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal*. Bandar Lampung: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Website :

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, <http://www.apjii.or.id> diakses pada tanggal 13 Agustus 2016, Pukul 14.00 WIB

[Http://www.republika.co.id/about/](http://www.republika.co.id/about/), diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul. 10.26 WIB.

[Http://metrotvnews.com/home/about/](http://metrotvnews.com/home/about/), diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul. 12.00 WIB.

Kemertian Komunikasi dan Informasi, <http://www.Kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, Pukul. 14.00 WIB.

- Komisi Pemilihan Umum Jakarta, http://kpujakarta.go.id/view_berita/, diakses tanggal 13 Desember 2016, pukul 14.00 WIB.
- Kementrian Agama RI, <http://kemenag.go.id/>Diakses pada tanggal 13 Desember 2016, pukul 14.00 WIB
- Lim, Merlyna, <http://merlyna.org/2012/02/21/league-of-13-media-concentration-in-indonesia>, Diakses 18 April 2017, Pukul 10.36 WIB.
- Oji Kurniadi, 2013. "Budaya Jurnalistik Metro TV", Jurnal KajianKomunikasi, Volume 1, No. 2, Desember, Url: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/download/6038/314918>. diakses 18 April 2017, Pukul 10.33 WIB.
- Shoemaker Pamela J., and Stephen D Reese, *Mediating the Messages*, URL: <https://journalism.utexas.edu/sites/default/files/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/mediating-the-message.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2017, pukul 19.02 WIB.
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Viva.co.id, 2016, Pernyataan lengkap Ahok sebut Surat Al Maidah 51. <https://www.youtube.com/shared?ci=tHI6wFdWl-Y>, diakses pada tanggal 7 oktober 2016, pukul 20.00 WIB.